

**Pariwisata Kabumian  
Mewujudkan Wisata Lestari Berbasis Potensi Lokal Kebumen**

**Kabumian Tourism  
Realizing Local Potencial-Based Sustainable Tourism**

**Sigit Tri Prabowo<sup>1)</sup>, Kezia Kristananda<sup>2)</sup>**

1) Biro Wisata dan Pengembangan Destinasi MILANGKORI

2) Jurusan Kajian Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Naskah Masuk: 25 November 2022 Naskah Revisi: 25 November 2022 Naskah Diterima: 29 Desember 2022

**ABSTRAK**

*Kabupaten Kebumen memiliki potensi pariwisata yang lengkap dan dapat dikembangkan menjadi salah satu lokomotif kemajuan ekonomi lokal. Daya tarik wisata berbasis alam, budaya dan buatan dapat dan telah dikembangkan baik oleh pemerintah, swasta maupun komunitas teritorial. Kenyataan di lapangan banyak inisiasi pengembangan wisata oleh desa dan komunitas yang gagal atau berhenti setelah berjalan beberapa saat. Penyebab utama kegagalan adalah konsep wisata yang dikembangkan tidak sesuai dengan kondisi lokal serta mengabaikan perkembangan trend pasar pariwisata. Konsep ekowisata yang sangat cocok dikembangkan oleh wisata berbasis komunitas justru diabaikan karena pesona wisata masal yang lebih cepat mendatangkan keuntungan. Kelemahan itu diperparah dengan perencanaan yang buruk, kapasitas sumber daya manusia yang tak memadai serta minimnya fasilitasi dan regulasi oleh pemerintah. Tulisan ini merupakan ulasan kritis berdasarkan fakta-fakta lapangan yang ditemui oleh tim Milangkori Tour selama melaksanakan ekowisata di Kabupaten Kebumen.*

**ABSTRACT**

*Kebumen Regency has complete tourism potential and can be developed into one of the locomotives of local economic progress. Natural, cultural and artificial-based tourist attractions can and have been developed by the government, private sector and territorial communities. The reality on the ground is that many initiations of tourism development by villages and communities fail or stop after a while. The main cause of failure is that the tourism concept developed is not in accordance with local conditions and the tendency of potential market share. The concept of ecotourism that is very suitable to be developed by community-based tourism has been ignored because of the charm of mass tourism which is more profitable. This weakness is exacerbated by poor planning, inadequate human resource capacity and lack of facilitation and regulation by the government. This paper is a critical review based on field facts encountered by the Milangkori Tour team while carrying out ecotourism activities in Kebumen Regency.*

## **PENDAHULUAN**

Bagi para praktisi dunia pariwisata, Kebumen ibarat batu permata yang belum terasah namun mulai muncul celah-celah di permukaan dimana gemerlap batu mulia menyeruak keluar. Kebumen memiliki banyak keunggulan kompetitif. Keunggulan tersebut dapat didapat dari faktor geografis, budaya dan infrastruktur transportasi. Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kebumen 2017 - 2025 (Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2017), potensi geografis ini dipetakan ke dalam Kawasan Strategis Pengembangan Kepariwisata (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pembangunan Kepariwisata (KPPK). Secara umum pemetaan yang dilakukan telah menunjukkan kesadaran keragaman potensi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Sekalipun belum terlalu jelas dibahas, aspek budaya sudah disadari sebagai salah satu potensi strategis pengembangan wisata Kebumen. Penetapan kawasan strategis Gombang dan Sempor yang berbasis budaya setidaknya menunjukkan adanya kesadaran awal meskipun sesungguhnya potensi budaya menyebar di kawasan yang jauh lebih luas. Dari segi infrastruktur transportasi juga cukup detail dijabarkan arah pembangunan aspek transportasi, baik dari kabupaten, di dalam kabupaten maupun di dalam lokasi destinasi. Namun mengingat RIPPKAB merupakan dokumen jangka panjang, maka beberapa perkembangan infrastruktur terbaru belum cukup mendapat ruang. Perlu kecermatan dalam tahap implementasi agar arah rencana induk tetap sederap dengan perkembangan teknologi dan fasilitas transportasi.

Pengembangan pariwisata di Kebumen masih jauh dari harapan yang termaktub dalam dokumen RIPPKAB. Amanah dan arah yang dirumuskan dalam RIPPKAB ternyata belum dapat mewujudkan dalam penerapannya di lapangan. Destinasi wisata yang dikelola pemerintah harus diakui sudah melewati masa puncaknya. Perkembangan pasar pariwisata yang semakin pesat akan semakin sulit diikuti

oleh destinasi ini mengingat beban prosedur birokrasi yang mesti dilewati untuk membuat setiap perubahan.

Sementara destinasi wisata non-pemerintah yang diklaim menyumbang cukup banyak wisatawan sebenarnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa dari 630.438 wisatawan pada tahun 2021, 484.455 orang (76%) berkunjung ke Pantai Menganti, 26.000 (4%) ke Jembangan Wisata Alam dan 20% sisanya dibagi lebih dari 30 destinasi wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kebumen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat belum dapat berjalan baik. Berbagai inisiasi pengembangan destinasi wisata -- utamanya yang berbasis desa dan komunitas-- tidak dapat bertahan lama. Akibatnya sekian banyak dana desa dan dana swadaya terbuang percuma.

Artikel ini mengulas bagaimana konsep ekowisata dapat menjadi pilihan bagi masyarakat Kebumen dalam pengembangan wisata berbasis komunitas/masyarakat (*community based tourism/CBT*). Juga akan dipaparkan bagaimana wisata massal (*mass tourism*) yang selama ini menjadi ikon pengembangan wisata (karena aliran uang yang mengalir deras) sebenarnya membawa potensi kerusakan lingkungan serta polusi sosial budaya.

Secara geografis Kebumen terletak di dataran rendah sepanjang pantai Samudera Hindia dengan perbatasan barisan perbukitan Serayu Selatan di sisi Utara. Hal ini memberikan kontur alam yang relatif lengkap, mulai dari kawasan pedesaan di tengah perbukitan yang mencapai ketinggian 500 MDPL hingga kawasan dataran pantai.

Begitupun pantai Kebumen memiliki dua zona yang sangat kontras dan menarik. Dari muara Sungai Cingcing Guling ke Timur hingga muara Sungai Wawar adalah kawasan pantai landai yang sering disebut sebagai Kawasan Urut Sewu. Di sini selain pesona pantai konvensional, juga dapat dijumpai wisata konservasi tukik,

agrowisata serta wisata jelajah dengan menggunakan kendaraan roda empat. Di sisi Barat, di kawasan antara Sungai Cingcing Guling dan Sungai Bodo/Ijo, terbentanglah deretan pantai karst dengan tebing-tebing curam yang eksotis. Potensi wisata tempat ini tak terbantahkan lagi dengan munculnya Menganti sebagai salah satu wisata unggulan, tak hanya di Kebumen bahkan di Jawa Tengah. Masih di kawasan Barat, perbukitan karst yang membujur dari pantai hingga perbukitan Serayu di Utara merupakan laboratorium alam yang sangat lengkap untuk wisata edukasi dan wisata alam. Di sini pula terletak ratusan gua karst, salah satunya adalah Gua Jatijajar, obyek wisata milik pemerintah yang paling banyak didatangi wisatawan. Mengingat pentingnya fungsi ekologis dari kawasan karst ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK). Dengan penetapan ini diharapkan pemanfaatan kawasan akan mematuhi rambu-rambu perlindungan aset ekologis, historis dan edukasi.

Perbukitan Serayu Selatan di sepanjang sisi Utara didominasi oleh hutan pinus milik Perhutani yang di beberapa tempat dikembangkan oleh masyarakat desa sebagai destinasi wisata. Kebanyakan destinasi yang dikembangkan merupakan kombinasi antara pemandangan alam, keragaman tumbuhan serta obyek-obyek buatan seperti gardu pandang dan spot foto. Di kawasan Utara ini pula terdapat kawasan sangat penting dalam konteks ilmiah maupun wisata edukasi yaitu Kawasan Cagar Alam Geologi (KCAG) Karangsembung. Kawasan yang memiliki keragaman geologi terlengkap di Asia Tenggara ini menjadi obyek studi lapangan para mahasiswa Geologi di Indonesia. Pada tahun 2019, berdasarkan usulan pemerintah Kabupaten Kebumen, KCAG Karangsembung dan KBAK Gombong Selatan ditetapkan sebagai Geopark Nasional Karangsembung – Karangbolong. Status ini semakin menambah amunisi pengembangan wisata di Kebumen, baik

dari sisi branding maupun diversifikasi produk wisata.

Sebelum terjadi Perang Jawa yang menandai mulainya era kolonial di Jawa, Kebumen masuk ke dalam wilayah *mancanegari kilen* (mancanegara Barat) bersama dengan Purworejo (Bagelen), Banyumas dan Cilacap. Berbeda dengan Banyumas yang di masa itu sudah memiliki fungsi strategis bagi Mataram, Kebumen masih merupakan *terra incognita*, daerah tak dikenal. Wilayah yang banyak bersentuhan dengan peradaban adalah kawasan Urut Sewu. Di sanalah terbentang jalan raya yang digunakan para bangsawan Banyumas ketika menghadap raja Mataram.

Sebagai jalur lintas utama, tak heran kebudayaan yang berkembang di kawasan Selatan sangat terpengaruh oleh budaya-budaya yang dibawa oleh pihak keraton. Suburnya bentuk-bentuk kesenian khas keraton Mataram seperti wayang kulit, wayang orang, karawitan dan kethoprak menunjukkan kuatnya pengaruh budaya keraton di wilayah itu. Sementara dari sisi kebahasaan, penduduk kawasan Kebumen Timur (Prebun dan sekitarnya) merupakan pengguna sub dialek Kedu yang jauh berbeda dengan dialek Banyumasan yang ada di Barat.

Pada masa itu, kawasan Utara masih terisolasi. Orang luar yang datang ke sana kebanyakan para ulama yang melakukan syiar agama atau justru tokoh-tokoh politik yang tengah berkonflik atau hendak mengasingkan diri. Ditelisik dari dialek dan sub dialek, kawasan Barat sangat dipengaruhi oleh Bahasa Banyumasan (*ngapak*). Sementara itu, kawasan karst serta lereng Barat merupakan wilayah Kebumen yang sangat dipengaruhi budaya Pasir Luhur yang mencakup kawasan Banyumas dan Cilacap. Hidupnya legenda Lutung Kasarung di kawasan karst menjadi bukti kuatnya pengaruh Pasir Luhur pada kebudayaan setempat. Pertemuan arus-arus kebudayaan di Kebumen ini memunculkan berbagai produk budaya yang beragam pula: kesenian, kerajinan, pola hidup dan lain-lain. Kondisi ini potensial menciptakan konten wisata budaya yang beragam pula.

Sebuah keuntungan yang tidak dimiliki setiap daerah.

Para penggemar film animasi pasti tak asing dengan *Cars*, film yang menceritakan kehidupan di kota kecil bernama Radiator Springs. Kota ini terletak di jalan Route 66 yang semula adalah jalur perdagangan ramai di Amerika. Pertumbuhan jalan tol serta berbagai jalan pintas antar kota menyebabkan Route 66 ditinggalkan para pengguna yang berakibat matinya kota Radiator Springs.

Pembangunan jalan tol yang masif di sisi Utara Jawa serta rencana pembangunan jalur Cilacap Yogyakarta membawa ancaman pada Kabupaten Kebumen. Jika tak cukup siap menyiapkan langkah tepat, bukan tak mungkin Kebumen akan senasib dengan Radiator Spring. Tanda-tanda ini setidaknya sudah tampak ketika Tol Cipali mulai beroperasi di bulan Juni 2021. Rumah makan dan area istirahat yang mengandalkan rombongan bus wisatawan mengalami penurunan omset hingga 50% (wawancara dengan pengusaha rumah makan di Gombang dan Karanganyar).

Namun selain sisi negatif, ada pula sisi positif dari pengembangan infrastruktur transportasi. Pemandangan penerbangan domestik dan internasional dari lapangan terbang Adi Sucipto Yogyakarta ke Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo memberikan peluang emas. Jarak tempuh dari airport ke pusat kota Kebumen hanya memakan waktu satu jam. Ini tentu sangat memudahkan para wisatawan dan pejalan yang menggunakan moda transportasi udara. Pengembangan Lapangan Terbang Jenderal Soedirman di Purbalingga semestinya dicermati sebagai peluang lain. Peluang lain yang sangat signifikan adalah dibangunnya jaringan rel jalur ganda oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Jalur pengembangan jalan tol yang tidak terlalu suportif untuk Kebumen membuat kereta api menjadi moda andalan dalam menggenjot kedatangan wisatawan.

Berkurangnya pembatasan perjalanan juga menunjukkan kenaikan jumlah pengguna

moda kereta api. Catatan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, jumlah penumpang penerbangan domestik pada bulan Januari 2002 sebesar 3,9 juta orang sementara pengguna kereta api pada periode yang sama sebesar 17,7 orang. Sekalipun data tersebut tidak menunjukkan berapa jumlah wisatawan namun setidaknya memperlihatkan perbandingan potensi pesawat terbang dengan kereta api sebagai pilihan moda transportasi.

Masih terkait dengan moda kereta api, Kebumen memiliki keunggulan kompetitif terkait jarak tempuh dari Jakarta. Data yang dirilis Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan bahwa Jabodetabek menduduki peringkat empat penyumbang wisatawan ke kota itu. Kebumen yang dapat ditempuh selama enam jam menggunakan kereta api menjadi pilihan idel dibandingkan dengan Jakarta - Jogja yang harus ditempuh tujuh sampai delapan jam. Karena itulah lepas dari pembangunan tol yang terkesan melompati Kebumen, moda kereta api dan penerbangan domestik mesti dipandang sebagai faktor peluang bagi pengembangan pariwisata Kebumen.

Berbagai keunggulan geografis, budaya dan infrastruktur transportasi menegaskan potensi terpendam yang dimiliki Kebumen. Meminjam istilah dunia batu akik yang sempat *booming* beberapa waktu lalu, Kebumen adalah bongkahan batu badar besi yang menunggu diasah agar tampil cantik dan bernilai tinggi.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Ekowisata: Peluang, Tantangan Dan Arti Pentingnya**

Gagasan tentang ekowisata pertama kali muncul di awal 1970an ketika para ahli lingkungan dan pelaku wisata mulai melihat efek negatif dari kegiatan wisata yang dilakukan secara massal. Muncul kegelisahan untuk menimbang kembali kemanfaatan pariwisata, tidak hanya terkait akses lingkungan namun juga tingkat manfaat yang dapat dipetik oleh masyarakat lokal.

Namun baru di era 1990an, konsep dan istilah *ecotourism* (ekowisata) dikaji secara serius oleh pada akademisi. Sekurang-kurangnya ada tiga pengertian ekowisata yang dirumuskan dalam konteks perjalanan ke kawasan alami seperti dirangkum oleh Drumm dan Moore (2005:15) dan Wood (2002: 9), sebagai berikut:

1. Definisi yang pertama kali diterima secara luas adalah definisi yang diberikan oleh The International Ecotourism Society pada tahun 1990, yaitu: "Ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab ke kawasan alami untuk mengkonservasi lingkungan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat lokal"
2. Martha Honey pada tahun 1999 juga mengusulkan pengertian yang lebih detail, yaitu: "Ekowisata adalah perjalanan ke kawasan rentan, belum terjamah, dan dilindungi namun berdampak rendah dan skala kecil. Ekowisata mendidik wisatawan, menyediakan dana untuk konservasi, memberikan manfaat langsung bagi pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal, dan mengedepankan respek terhadap perbedaan budaya dan hak azasi manusia"
3. Lembaga Konservasi Alam Dunia IUCN pada tahun 1996 memberikan pengertian yang diadopsi oleh banyak organisasi, yaitu: "Ekowisata adalah perjalanan bertanggung jawab secara lingkungan dan kunjungan ke Kawasan alami, dalam rangka menikmati dan menghargai alam (serta semua ciri-ciri budaya masa lalu dan masa kini) untuk mempromosikan konservasi, memiliki dampak kecil dan mendorong pelibatan sosial ekonomi masyarakat lokal secara aktif sebagai penerima manfaat"

Setidaknya ada delapan puluh definisi tentang ekowisata yang dilontarkan. Di Indonesia sendiri, pengertian ekowisata dapat dilihat dalam pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, yaitu "Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi

sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal".

Berbagai definisi di atas mesti dikaitkan juga dengan definisi obyek atau daya tarik wisata. Setelah berlakunya undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, istilah objek wisata diganti menjadi daya tarik wisata yang memiliki definisi segala sesuatu keunikan, keindahan dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Dari berbagai definisi tersebut, muncul beberapa kata kunci yang dapat dipandang sebagai karakter ekowisata, yaitu: alam, budaya, konservasi, pemberdayaan, masyarakat lokal, kesejahteraan. Kata-kata kunci ini menjadi penting untuk melihat ulang berbagai kegiatan wisata yang terkait dengan alam apakah dapat disebut sebagai ekowisata. Lintas alam menggunakan sepeda motor trail misalnya. Jika dalam pelaksanaannya mengabaikan unsur pelestarian alam, tidak melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal serta tidak memberi manfaat apapun kepada masyarakat dan wilayah yang ditempati, maka kegiatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai ekowisata.

### **Peluang Pasar Ekowisata**

Pandemi Covid-19 yang berlangsung hampir selama dua tahun secara masif memporakporandakan industri pariwisata dunia tak terkecuali Indonesia. Hampir semua lini industri pariwisata lumpuh. Sebuah peristiwa global yang menyadarkan kita semua betapa rapuhnya industri pariwisata kita, betapa mudah berubahnya pasar pariwisata. Bagaimanapun, bencana pandemi tersebut juga membawa berbagai hikmah. Salah satunya adalah arti pentingnya wisatawan nusantara.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam dokumen Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022, pergerakan wisatawan nusantara pada tahun 2020 diukur dengan metode terbaru *Mobile Positioning Data* (MPD) sebesar 518,6 juta. Sementara tahun 2021

diestimasikan mencapai 569 juta orang. Kondisi ini didukung dengan peningkatan tren mobilitas penduduk di tempat perdagangan retail & rekreasi dari Oktober hingga Desember 2021.

Meningkatnya jumlah wisnus berdampak besar terhadap okupansi hotel di Indonesia. Sepanjang tahun 2021, okupansi hotel mengalami tren positif, dari 30,35% pada bulan Januari hingga 51,57% di bulan Desember 2021. Pemulihan terjadi pada industri perhotelan, jika dibandingkan Desember tahun 2020 yang hanya mencapai 40,14%. Bisa dibilang, tren ini terjadi hampir di seluruh Daerah Super Prioritas (DSP) dan Daerah Pariwisata Prioritas (DPP), kecuali Bali yang masih berkontraksi sebesar -16,8%.

Dalam konteks Kebumen dengan segala potensi yang sudah dipaparkan di bagian sebelumnya, wisatawan nusantara adalah pangsa pasar yang paling potensial dan paling realistis untuk digarap. Dari sisi pasar produk pariwisata, secara global pertumbuhan pasar ekowisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan wisata konvensional beberapa tahun terakhir. Selain dari sisi permintaan, terlihat juga sisi penawaran yang meningkat karena fenomena sosial dan ekonomi yang menarik dalam pasar ekowisata. Hal ini karena potensi ekowisata bisa dikelola dari semua objek (alam, budaya, buatan) dan semua potensi itu bisa direkayasa agar dapat memberikan nilai daya tarik bagi wisatawan. (Mochammad Nafia, 2017).

Berdasarkan analisis *The International Ecotourism Society* 2000 pertumbuhan pasar ekowisata berkisar antara 10-30 persen pertahun sedangkan pertumbuhan wisatawan secara keseluruhan hanya 4 persen. Tahun 1998 WTO memperkirakan pertumbuhan ekowisata sekitar 20 persen. Di Indonesia diperkirakan sekitar 25 persen wisatawan mancanegara pada tahun 1996 merupakan ekowisatawan *ecotourist*. Statistik ini menunjukkan bahwa perilaku pasar pariwisata sedang berlangsung saat ini dan ekowisata akan menjadi pasar wisata yang sangat prospektif di masa depan. Perkembangan pasar ekowisata diperkirakan akan semakin melonjak pascapandemi. Hal ini disebabkan kecenderungan pasar yang menjadi sangat memperhatikan faktor kesehatan

(higienitas), alam terbuka, menghindari kerumunan dan mengurangi pergerakan (*staycation*). Kecenderungan-kecenderungan ini adalah karakter dan keunggulan yang dimiliki oleh ekowisata.

### **Tantangan Ekowisata**

Sekalipun ekowisata secara masif sudah diperkenalkan sejak dekade 1990an, tidak serta merta produk ini berkembang dan diterima para pelaku industri pariwisata. Alih-alih menggeser posisi wisata massal, pemahaman serta kesadaran atas arti penting ekowisata masih jauh dari benak para pelaku industri pariwisata. Kebijakan pemerintah serta cara pandang banyak pihak yang melihat pariwisata sebagai cara mudah mendapatkan uang menghasilkan konsep-konsep pariwisata yang didasarkan pada keuntungan-keuntungan ekonomi jangka pendek. Berbagai prinsip pengembangan wisata berkelanjutan yang bertebaran di undang-undang, dokumen rencana pengembangan pariwisata dan lain-lain menjadi tumpul ketika dihadapkan dengan target-target yang sangat kuantitatif.

Di tingkat kabupaten kota bahkan kemajuan pariwisata sangat sering diukur semata-mata dari angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat. Tuntutan ini menyebabkan banyak pemerintah daerah yang sebenarnya dalam amanah Undang Undang Pariwisata ditetapkan sebagai regulator dan fasilitator industri pariwisata akhirnya terjebak menjadi operator destinasi wisata yang harus menjual tiket masuk sebanyak-banyaknya.

Sekalipun aspek ekonomi dan kesejahteraan merupakan unsur wajib dalam pengembangan ekowisata, jumlah yang diraih dan laju peningkatan neraca laba tidak akan pernah bisa menyamai kucuran laba dari bentuk-bentuk wisata massal. Target ekonomi jangka pendek ini akhirnya membuat ekowisata tak lagi menjadi pilihan ideal, bahkan di tempat-tempat yang mengunggulkan potensi alam dan budaya sebagai daya tariknya. Kondisi ini juga menjadikan ekowisata menjadi tak cukup menarik bagi investor konvensional. Keuntungan finansial yang cenderung lambat serta tuntutan proses jangka panjang membuat

ekowisata bukan pilihan investasi yang menggiurkan.

### **Arti Penting Ekowisata**

Selain karena trend pasar pariwisata yang semakin berpihak pada ekowisata, ada isu-isu lain yang semakin menegaskan arti penting pengembangan produk wisata jenis ini. Secara ekologis, ekowisata menjadi pilihan tak terbantahkan untuk membendung rusaknya atau berkurangnya kualitas lingkungan sebagai dampak kegiatan pariwisata. Dari kedua sisi (pasar dan konsumen), ekowisata menuntut komitmen yang sama besarnya terhadap pelestarian alam. Konsep pariwisata lestari (*sustainable tourism*) adalah panduan bagi para pelaku industri wisata untuk mewujudkan praktek-praktek pariwisata berwawasan lingkungan. Sementara wisata bertanggungjawab (*responsible tourism*) adalah panduan bagi para wisatawan untuk berperilaku sesuai dengan kaidah pelestarian alam.

Dari sisi kemanfaatan ekonomis, ekowisata menjamin keadilan distribusi manfaat dan pendapatan. Pemusatan keuntungan pada investor atau sekelompok kecil masyarakat tidak akan terjadi manakala kaidah ekowisata diterapkan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi berkala.

Ekowisata juga menjadi pilihan untuk menghindari terjadinya benturan budaya lokal dengan berbagai bentuk budaya yang dibawa wisatawan. Pilar penghormatan terhadap keragaman budaya dan hak asasi manusia akan memunculkan interaksi budaya yang konstruktif dan saling memperkaya secara positif.

Bentuk-bentuk ekowisata yang mengoptimalkan potensi lokal dan tidak padat investasi juga membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat lokal. Dengan pendampingan peningkatan kapasitas yang tepat, masyarakat dengan pengetahuan dan kearifan lokalnya akan menjadi perencana dan pengelola ekowisata yang handal.

## **PEMBAHASAN**

### **Wisata Kabumian: Lokomotif Pertumbuhan**

Berbagai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa (potensi) pendapatan pariwisata Kebumen justru didominasi oleh wisata-wisata yang dikelola masyarakat / CBT (*community based tourism*). Hal ini dapat dipahami karena jumlah destinasi CBT jauh lebih banyak daripada sembilan destinasi yang dikelola pemerintah daerah. Data dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mengungkapkan bahwa saat ini ada dua puluh satu desa wisata di Kebumen. Banyak di antaranya yang mengelola lebih dari satu destinasi, bahkan hingga lima lokasi dalam satu desa.

Selain itu, wisata berbasis masyarakat relatif lebih adaptif terhadap perkembangan permintaan pasar sehingga lebih menarik bagi wisatawan. Bupati Kebumen sendiri sudah melihat peluang besar pengembangan pariwisata di Kebumen. Visi Misi Bupati yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menempatkan pariwisata sebagai sektor lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah.

### **Wajah Suram di Lapangan**

Meski demikian harus diakui kenyataan di lapangan masih jauh dari yang diidamkan. Dari dua puluh empat desa wisata, baru lima desa yang dikategorikan maju. Sisanya adalah desa wisata berkembang (empat belas desa) dan rintisan (dua desa).

Kenyataan di lapangan semakin menyedihkan. Sebagian besar destinasi yang dikembangkan oleh masyarakat (baik desa, komunitas maupun lembaga lain) tidak mampu berkembang dengan baik. Beberapa bahkan gulung tikar dalam hitungan tahun atau bulan. Sayangnya pendataan dan evaluasi yang sah atas fenomena ini belum dilakukan sehingga sulit untuk mendapatkan data-data tertulis.

Hingga saat ini pendapatan dari sektor pariwisata CBT di Kebumen masih dikuasai oleh Pantai Menganti. Data dari Perhutani mengungkapkan bahwa di tahun 2021, Pantai Menganti menyedot 115 ribu pengunjung. Jumlah ini menempatkannya di peringkat ketiga setelah Kota Lama Semarang dan Candi Borobudur. Di sisi lain, banyak destinasi CBT

yang hanya meraih belasan ribu bahkan ratusan pengunjung dalam setahun. Data statistik ini tentu berbanding lurus dengan jumlah rupiah yang mengalir. Menjadi sebuah fakta tak terbantahkan di mata masyarakat bahwa wisata Menganti (yang dikonsepsi wisata massal) lebih ampuh mendatangkan rupiah daripada ekowisata.

### **Ekowisata untuk Kebumen**

Dengan pencapaian finansial Menganti yang begitu cemerlang, menjadi tantangan ke depan untuk meyakinkan para pengelola destinasi CBT bahwa prinsip-prinsip ekowisata adalah pilihan terbaik untuk pengembangan wisata. Destinasi-destinasi berbasis jumlah pengunjung selalu membawa sisi gelap dalam pencapaiannya. Ketersediaan fasilitas yang memadai, air bersih dan fasilitas kesehatan serta adanya manajemen pengelolaan limbah yang baik sering menjadi tanggungjawab yang terabaikan.

Dengan keterbatasan kompetensi dan sumber daya, semestinya desa wisata memilih wisata skala kecil yang dampak lingkungannya dapat diantisipasi dan dikelola dengan baik. Sekalipun penghasilan langsung (*direct income*) dari penjualan tiket tak spektakuler seperti wisata massal, manfaat tak langsung (*indirect income*) jauh lebih bisa dipetik dari ekowisata.

Potensi alam, budaya dan sosial yang begitu beragam harus dipetakan dan dilakukan pembobotan secara cermat untuk dapat dimanfaatkan secara optimal. Begitu pula dengan keunggulan geografis sebagaimana dipaparkan di awal tulisan ini. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu diperlukan keseriusan dari tahap penilaian, perencanaan, implementasi hingga evaluasi berkelanjutan. Dalam konteks inilah peran Pemerintah Daerah sebagai regulator dan fasilitator pengembangan wisata daerah (sebagaimana termaktub dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) mesti dioptimalkan.

Mengingat beban administratif serta siklus pergantian personel yang cukup cepat di lingkungan birokrasi, perlu dibentuk sebuah badan yang lebih stabil dan mampu membuat perencanaan dan evaluasi pengembangan

pariwisata yang baik. Sudah saatnya pemerintah daerah mengulurkan tangan kepada pihak-pihak terkait untuk duduk bersama dalam satu wadah yang bertugas merencanakan dan mengawal perkembangan pariwisata Kebumen. Tumbuhnya simpul-simpul pariwisata berbasis masyarakat yang sehat, ekologis serta dinamis mengikuti perkembangan pasar akan berujung pada perkembangan pariwisata yang berkeadilan serta berdaya ungkit bagi kemajuan Kebumen secara keseluruhan.

Meminjam jargon yang berkembang di masyarakat Kebumen, dapatlah gagasan ini diwadahi dalam nama Pariwisata Kabumian. Kata Kabumian yang berasal dari nama Pangeran Bumidirjo, tokoh sejarah Kebumen, mengandung nilai kearifan lokal. Kata kabumian juga memuat semangat membumi pada nilai dan kearifan lokal. Di samping itu, nama ini juga merujuk pada salah satu ikon Kebumen yaitu Geopark Nasional Karangsambung Karangbolong yang tengah diajukan menjadi Global UNESCO Geopark.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Pariwisata di Kebumen sudah saatnya mengadopsi konsep ekowisata. Pilihan ini akan memberi ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat, memberi manfaat berkelanjutan (*sustainable benefit*) namun dengan eksekusi lingkungan yang minimal dan dapat dikelola oleh masyarakat dan komunitas. Pengembangan pariwisata yang kolaboratif akan menjamin terjaganya asas keadilan, kesetaraan dengan tetap memegang prinsip konservasi alam dan budaya serta penghormatan pada kearifan lokal.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kiranya bisa dipertimbangkan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dibentuk sebuah badan perencanaan dan pengembangan destinasi yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi dan praktisi.
2. Dirumuskan metode pendampingan berkesinambungan yang tepat metode, tepat materi, tepat sasaran dan tepat capaian.
3. Dirumuskan panduan pengembangan ekowisata yang kontekstual berdasarkan potensi dan kondisi lokal Kebumen.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Bhayu Rama, 2018, Peluang Ekowisata dalam Industri 4.0 di Indonesia, dalam JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Issue 2 (2019)
- BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Kebumen, *Kebumen Dalam Angka 2022*, Kebumen, Badan Pusat Statistik
- Dinas Pariwisata dan Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah, 2021, *Draft Buku Pariwisata Jawa Tengah dalam Angka*, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Dowling RK dan Fennell DA. 2003. *The Context of Ecotourism Policy and Planning*. Di dalam: Fennel DA dan Dowling RK (editor). *Ecotourism Policy and Planning*. Cambridge. CABI Publishing.
- Ferdinal Asmin, 2017, Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan, -
- Kementerian Pariwisata, 2019, *Pedoman Pengembangan Wisata Sejarah dan Budaya*, Kemenpar
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021, *Outlook 2021/2022*, Kemenparekraf RI
- Sumber Wawancara :
1. Pengelola wisata Pantai Menganti Desa Karangduwur, Kabupaten Kebumen
  2. Ketua Forum Komunikasi Pokdarwis Kabupaten Kebumen
  3. Pengelola Taman Pokdarwis Waduk Sempor, Sempor, Kebumen
- Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Cabang Kebumen
- Biodata Penulis : Sigit Tri Prabowo<sup>1)</sup>, Kezia Kristananda<sup>2)</sup>
- 1) Biro Wisata dan Pengembangan Destinasi MILANGKORI
  - 2) Jurusan Kajian Pariwisata, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada